

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja (Renja) merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan, Program dan kegiatan serta indikator kinerja berikut kelompok sasarannya.

Semoga Penyusunan RENJA ini bermanfaat dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.

Binjai, Januari 2020

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BINJAI**

**ISMAIL GINTING, S.Pd, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640607 198903 1 006**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	9
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	11
3.3 Program dan Kegiatan	12
BAB IV PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai , dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang dicapai pada masa satu tahun. Dalam penyusunan Renja juga tidak terlepas dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai (RKPD).

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2020 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2020. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai serta kerangka pendanaan daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra PD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2020, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
10. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
11. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Binjai No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Binjai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2020;

16. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
17. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;
18. Peraturan Walikota Binjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan

- a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2020;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020;
- c. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja)Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan berikut :

Tabel 2.1.1.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2019

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 12. Subsidi Premi BPJS Ketenagakerjaan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan LAKIP/SAKIP/ LKj 2. Penyusunan RENJA

5	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	1. Pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan tahun 2019 di dpmpptsp kota binjai
---	---	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sampai saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Binjai.

Bidang- bidang terdiri dari :

1. Bidang Penanaman Modal
2. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan
3. Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- Seksi Investasi dan Penanaman Modal
- Seksi Pengembangan Kerjasama dan Promosi
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan terdiri dari :

- Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
- Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan
- Seksi Pelayanan Perizinan Pendidikan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Lingkungan terdiri dari:

- Seksi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
- Seksi Perizinan Pengelolaan Lingkungan
- Seksi Perizinan Kontruksi dan Perhubungan

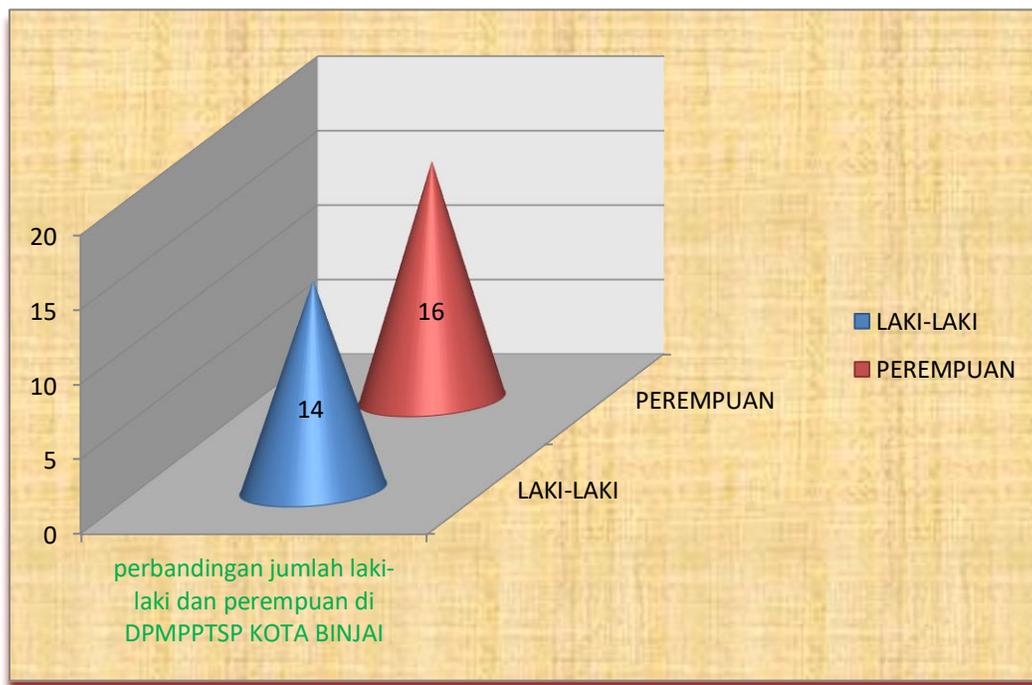
Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri dari :

- Seksi Penanganan Pengaduan
- Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- Seksi Pengolahan data dan Informasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang

**Perbandingan jenis kelamin
Pegawai DMPPTSP Kota Binjai**

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	16 orang
Perempuan	14 orang



REALISASI ANGGARAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
TAHUN 2019

NO	KODE REKENING	PROGRAM : KEGIATAN	JUMLAH DANA SESUAI PAGU (Rp)	SUMBER DANA	REALISASI		SISA DANA (Rp)
					KEUANGAN		
					(Rp)	(%)	
I	2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	708,413,600		681,788,792		26,624,808
1	2.12..01.01.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	96,500,000	APBD	96,080,000	100%	420,000
2	2.12.01.01.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84,000,000	APBD	82,544,884	98%	1,455,116
3	2.12.01.01.06	PENYEDIAAN JAS PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL	68,000,000	APBD	56,531,616	83%	11,468,384
4	2.12.01.01.07	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	81,000,000	APBD	79,270,000	98%	1,730,000
5	2.12.01.01.08	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	68,000,000	APBD	65,940,375	97%	2,059,625
6	2.12.01.01.10	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	75,000,000	APBD	74,985,805	100%	14,195
7	2.12.01.01.11	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	75,000,000	APBD	74,945,000	100%	55,000
8	2.12.01.01.12	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10,000,000	APBD	9,000,000	90%	1,000,000
9	2.12.01.01.15	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23,600,000	APBD	16,925,000	72%	6,675,000
10	2.12.01.01.17	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25,000,000	APBD	23,456,000	94%	1,544,000
11	2.12.01.01.18	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	100,000,000	APBD	99,819,652	100%	180,348
12	2.12.01.01.19	Subsidi Premi BPJS Ketenagakerjaan	2,313,600	APBD	2,290,460	99%	23,140
II	2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	82,686,400		19,975,000		62,711,400
1	2.12.01.02.09	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	52,686,400	APBD	0	0%	52,686,400
2	2.12.01.02.26	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	10,000,000	APBD	7,700,000	77%	2,300,000
3	2.12.01.02.28	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	20,000,000	APBD	12,275,000	61%	7,725,000
III	2.12.03.05	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	17,500,000		17,500,000		0
1	2.12.01.14.04	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA/HARI-HARI TERTENTU	17,500,000	APBD	17,500,000	100%	0
VI	2,12.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN	124,844,000		118,544,000		6,300,000
1	2.12.01.19.31	PENGAWASAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2019 DI DPMPTSP KOTA BINJAI	124,844,000	APBD	118,544,000	95%	6,300,000
JUMLAH			933,444,000		837,807,792	90%	95,636,208

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai

1. Adanya sistem aplikasi perizinan online (OSS) yang baru yang masih belum dimengerti oleh masyarakat untuk mengurus perizinan.
2. Belum Optimalnya promosi dan kerjasama invetasi;
3. Masih rendahnya pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD Provinsi dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	a	Terselenggaranya administrasi perkantoran	12 kegiatan
		b	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3 kegiatan
		c	Tercapainya peningkatan Disiplin Aparatur	1 kegiatan
2	Meningkatkan Pelayanan Perizinan	a	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan	1 Kegiatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas Nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ada lima prioritas nasional dalam RKP 2020 ini adalah :

- 1) Pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
- 3) Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja;
- 4) Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup;
- 5) Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Kunci untuk merealisasikan lima prioritas tersebut adalah dengan membentuk ekosistem yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berdaya saing, terdidik, dan berkarakter. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 mengangkat tema peningkatan SDM untuk dorong pertumbuhan berkualitas. Dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan, yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Tema RPJMN IV (2020 – 2024) dimaksud dapat disarikan dalam empat kata kunci yaitu:

1. Struktur perekonomian yang kokoh;
2. Keunggulan kompetitif wilayah; dan
3. SDM Berkualitas;
4. Infrastruktur yang kuat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan RPJMN 2020-2024 di prioritas Nasional ketiga yaitu Nilai tambah sektor riil dan industrialisasi serta memperluas kesempatan kerja dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu harus dapat mendorong investasi dibidang Industrialisasi dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang tersedia sebagai Tenaga Kerja sehingga mendorong perekonomian dan kesempatan kerja, sesuai dengan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yaitu Menciptakan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Mendorong Pertumbuhan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan merupakan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis lingkungan strategis tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah menetapkan tujuan yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan perizinan.
2. Mengembangkan iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan berbasis teknologi.
3. Meningkatkan inovasi pelayanan melalui Sumber Daya Aparatur yang handal, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Untuk itulah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai telah merumuskan sasaran berikut indikator- indikator keberhasilannya:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat serta dunia usaha yang baik terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
2. Meningkatkan Iklim Investasi melalui Sistem Informasi pelayanan Perizinan berbasis teknologi.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
4. Mendorong pertumbuhan perekonomian melalui Perizinan dan Penanaman Modal.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2020 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Penyediaan Makanan dan Minuman.
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- Subsidi Premi BPJS Ketenagakerjaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

- Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan
- Penyusunan Buku Saku Informasi Usaha Berbasis Gender Kota Binjai
- Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5. Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan

RENJA TAHUN 2020

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja						Pagu Indikator	Sumber Dana
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan			
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(16)
	WAJIB								
	Pemerintahan								
	Penanaman Modal								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan Administrasi yang tertangani	100%	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Pelayanan administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik	100%	851.704.060	APBD

1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Terselenggaranya komunikasi, sumber daya air dan listrik	80%	Lancarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	105.000.000	APBD
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	100%	Terpeliharanya kendaraan operasional kantor	100%	Kendaraan dinas dapat berfungsi dengan baik	100%	118.000.000	APBD
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	100%	Tersedianya layanan jasa adm. Keuangan	100%	lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	100%	177.000.000	APBD
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kebersihan kantor	100%	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	100%	43.950.000	APBD
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya peralatan Kantor	100%	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	Terpenuhinya kebutuhan ATK	100%	90.003.000	APBD
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya penyediaan barang cetak dan penggandaan	100%	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan	100%	108.893.940	APBD
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	Penerangan di Dinas PM dan PPTSP menjadi lancar	100%	8.700.480	APBD
1.8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Meningkatnya pengetahuan dan informasi melalui media masa	100%	18.000.000	APBD

1.9	Penyediaan Makan dan Minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman kantor	100%	Tersedianya makanan dan minuman kantor	100%	Meningkatnya kenyamanan tamu dan pegawai di Dinas PM dan PPTSP	100%	34.999.140	APBD
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	100%	Fasilitasi koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Terkoordinasi dan lancanya perjalanan dinas luar daerah	100%	143.657.500	APBD
1.11	SUBSIDI PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN	Terlaksananya Premi BPJS Ketenagakerjaan	100%	Terjaminnya Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honor	100%	Terjaminnya Asuransi Ketenagakerjaan bagi Pegawai Honor	100%	3.500.000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang lebih baik	100%	Terciptanya kenyamanan pegawai dalam bekerja	100%	190.488.820	
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya pengadaan perlengkapan gedung kantor	100%	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100%	Lancarnya kinerja pegawai Dinas PM dan PPTSP	100%	38.126.000	APBD

2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya pengadaan peralatan gedung kantor	100%	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	Lancarnya kinerja pegawai Dinas PM dan PPTSP	100%	9.045.900	APBD
2.3	Pengadaan Mebeleur	Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur	100%	Tersedianya pengadaan mebeleur	100%	Lancarnya kinerja pegawai Dinas PM dan PPTSP	100%	64.316.920	APBD
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor	100%	59.000.000	APBD
2.5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	Meningkatnya kinerja pegawai	100%	10.000.000	APBD
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	Meningkatnya kinerja pegawai	100%	10.000.000	APBD

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	Terselenggaranya peningkatan sumber daya aparatur	100%	Terciptanya sumber daya aparatur yang handal	100%	78.830.357	APBD
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	100%	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Dinas PM & PPTSP	100%	78.830.357	APBD
4	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terselenggaranya pelayanan perizinan yang lebih baik	100%	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Perizinan	100%	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	100%	67.614.972	APBD
4.1	Penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan	Terselenggaranya penyediaan Media Penyebarluasan Informasi Perizinan	100%	Terciptanya Media Penyebarluasan Informasi Perizinan	100%	Adanya Media Penyebarluasan Informasi Perizinan	100%	47.947.944,00	APBD

4.2	Penyusunan Buku Saku Informasi usaha berbasis gender Kota Binjai	Terselenggaranya Penyusunan Buku Saku Informasi usaha berbasis gender Kota Binjai	100%	Terlaksananya Penyusunan Buku Saku Informasi usaha berbasis gender Kota Binjai	100%	Adanya buku saku Informasi usaha berbasis gender Kota Binjai	100%	8.200.000,00	APBD
4.3	Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai	Terselenggaranya penyusunan laporan B03,B06,09 dan B012	100%	Terlaksananya penyusunan laporan B03,B06,09 dan B012	100%	Adanya buku SP	100%	11.467.028,00	APBD
5	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terselenggaranya pelayanan perizinan yang lebih baik	100%	Terlaksananya pelayanan perizinan yang lebih baik	100%	Pelayanan perizinan yang lebih baik	100%	454.099.690,00	APBD

5.1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	Terselenggaranya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	100%	Terlaksananya Penelitian, Pengendalian, dan Evaluasi Pemberian Izin dan Non Izin	100%	Terselenggaranya Kualitas dan Produktifitas Perizinan dan Non Perizinan	100%	454.099.690,00	APBD
TOTAL								1.642.737.899	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja-OPD merupakan dokumen perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, bahan Koordinasi dan evaluasi yang berisi rencana pelaksanaan program dan kegiatan beserta rencana anggaran dalam satu tahun anggaran sebagai implementasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam JM – OPD dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok OPD serta dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2020 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun Anggaran 2020. Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 ini, diharapkan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2020.